

PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- DRAFT RPM KOMINFO – KONSULTANSI PUBLIK
- Menimbang : a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.

2. Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar Pemblokiran.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan
- b. melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani;
- b. peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif;
- c. tanggung jawab Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif;
- d. tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif;

BAB III SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Pasal 4

- (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
 - a. pornografi;
 - b. perjudian;

- c. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada Direktur Jenderal.
- (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
- (3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait

Pasal 6

Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST+Positif.

Pasal 7

Masyarakat dapat ikut serta menyelenggarakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.

BAB V TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.

- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
- a. pemblokiran mandiri; atau
 - b. pemblokiran oleh pihak lain yang menyediakan layanan pemblokiran.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif.
- (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan
 - b. pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 jam.

BAB VI

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Laporan

Pasal 10

Tata cara penerimaan laporan meliputi:

1. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:
 - a. situs internet bermuatan negatif; atau
 - b. permintaan normalisasi pemblokiran situs.
2. Masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan;

3. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut:
 - a. hak pribadi;
 - b. pornografi anak;
 - c. kekerasan;
 - d. suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau
 - e. muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas.

Pasal 11

- (1) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di Kementerian/Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan;
- (2) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian;
- (3) Terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya.

Bagian Kedua

Tindak Lanjut Laporan

Pasal 12

Kegiatan pengelolaan laporan meliputi:

1. Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik.
2. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan
3. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik.

Pasal 13

Tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi:

1. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 jam
2. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
 - a. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif;

- b. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 14

Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi:

1. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif.
2. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana butir 1 dalam waktu 2 x 24 jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
3. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
4. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima;
5. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
 - a. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif;
 - b. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 15

Tata cara tindak lanjut laporan dari Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan meliputi:

6. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima;
7. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif;
8. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Bagian Ketiga

Tata Cara Normalisasi

Pasal 16

- (1) Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs.
- (2) Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak pelaporan diterima.
- (4) Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif, Direktur Jenderal:
 - a. menghilangkan dari TRUST+Positif;
 - b. melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet atas proses normalisasi tersebut;
 - c. melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DRAFT RPM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF
Tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

DRAFT RPM KOMINFO – KONSULTANSI PUBLIK